



LAPORAN
PERTEMUAN REGULER KOMITE PENGELOLA BERSAMA PERIKANAN (KPBP) TUNA
TAHUN 2025

OLEH:

KOMITE PENGELOLA BERSAMA PERIKANAN (KPBP) TUNA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Hotel Same - Kota Mataram
Selasa, 23 Januari 2025

Daftar Isi

Pendahuluan	3
Pelaksanaan	3
Peserta.....	3
Hasil Pertemuan.....	4
Rencana Kerja KPBP Tuna Provinsi NTB 2024-2026.....	7
Lampiran.....	11

Pendahuluan

Pertemuan reguler KPBP Tuna Provinsi NTB tahun 2025 ini merupakan tindaklanjut dari pertemuan reguler sebelumnya, yaitu memberikan informasi capaian rencana aksi dan tantangannya kepada para anggota KPBP untuk menjadi perhatian bersama. Pokok pembahasan pada pertemuan kali ini lebih menitik beratkan kepada update pengelolaan perikanan tuna ditingkat global, mekanisme potensi integrasi KPBP dengan LPPWPP dan pengenalan teknologi traceability. Selain itu, brainstorming dari seluruh anggota juga dilakukan sebagai upaya mengidentifikasi berbagai tantangan yang ada di lapangan untuk dicarikan solusinya. Harapannya kedepan, pelaksanaan rencana aksi dan tantangan yang saat ini dihadapi, dapat diperoleh jalan keluarnya dalam rangka kesejahteraan masyarakat pesisir dan keberlangsungan suberdaya ikan.

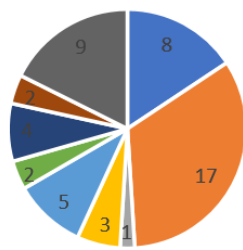
Pelaksanaan

Pertemuan Reguler Komite Pengelola Bersama Perikanan (KPBP) Tuna Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2025 diselenggarakan pada hari Kamis, 23 Januari 2025 bertempat di Hotel Same Kota Mataram. Kegiatan ini dilaksanakan secara luring. Dokumen yang berkaitan pada kegiatan ini seperti **materi presentasi, absensi, dokumentasi, dan catatan pertemuan serta laporan kegiatan**, dapat diakses pada link berikut; <https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n5mQVHZjIzCICKJG5rlw-8DO6laqbq6Y>

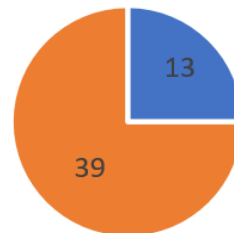
Peserta

Pertemuan Reguler Komite Pengelola Bersama Perikanan Tuna Provinsi NTB kali ini diikuti oleh 52 orang total peserta. Adapun rincian pesertanya adalah sebagai berikut;

Instansi/Lembaga %



Gender Peserta (%)



Hasil Pertemuan

Pembukaan	Substansi
<p data-bbox="224 363 570 432">Yasmin Simbolon, Direktur MDPI</p> <p data-bbox="224 478 475 512">Pengantar kegiatan</p>	<p data-bbox="597 363 1463 512">Menyampaikan bahwa Komite Pengelola Bersama Perikanan Tuna di Provinsi NTB atas kerja bersama telah memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pengelolaan perikanan tuna untuk nelayan kecil di NTB melalui berbagai inisiatif dan program strategis.</p> <p data-bbox="597 520 984 554">Beberapa di antaranya adalah:</p> <ol data-bbox="597 562 1463 1843" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="597 562 1463 961"> <p data-bbox="597 562 1049 596">1. Peningkatan Kapasitas Nelayan</p> <ul data-bbox="646 604 1435 961" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="646 604 1312 680">• Sertifikasi kecakapan nelayan guna meningkatkan keterampilan dan keselamatan kerja. <li data-bbox="646 688 1344 764">• Pendampingan koperasi nelayan untuk memperkuat kelembagaan ekonomi nelayan kecil. <li data-bbox="646 772 1435 848">• Pendampingan pengolahan sampah ditingkat rumah tangga nelayan <li data-bbox="646 856 1409 961">• Literasi keuangan nelayan sebagai upaya peningkatan kemampuan mengelola ekonomi nelayan ditingkat rumah tangga <li data-bbox="597 970 1463 1117"> <p data-bbox="597 970 1451 1003">2. Peningkatan Kapasitas Petugas Data, Pelatihan teknis (Bimtek) terkait identifikasi ikan untuk petugas data di 10 kabupaten/Kota di NTB untuk memastikan akurasi dalam pencatatan hasil tangkapan.</p> <li data-bbox="597 1125 1463 1356"> <p data-bbox="597 1125 893 1159">3. Legalitas Perikanan</p> <p data-bbox="639 1167 1393 1356">Fasilitasi penerbitan dokumen legal seperti Pas Kecil, eBKP (elektronik Buku Kapal Perikanan), PKKPR (Peretujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut), serta SIPR Rumpon (Surat Izin Penempatan Rumpon) bagi para pelaku usaha perikanan.</p> <li data-bbox="597 1365 1463 1554"> <p data-bbox="597 1365 987 1398">4. Penguatan Data Perikanan</p> <p data-bbox="639 1407 1442 1554">Upaya pengumpulan data primer dalam mendukung harvest strategy tuna dan validasi data statistik perikanan guna mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang akurat dan terkini.</p> <li data-bbox="597 1562 1463 1843"> <p data-bbox="597 1562 844 1596">5. Publikasi Ilmiah</p> <ul data-bbox="639 1604 1463 1843" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="639 1604 1463 1680">• Penerbitan buku profil perikanan tuna di NTB sebagai referensi bagi para pemangku kepentingan. <li data-bbox="639 1688 1435 1843">• Publikasi di jurnal internasional guna memperluas jangkauan informasi dan kolaborasi global dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan. Dan masih banyak lagi yang tidak dapat kami sebutkan <p data-bbox="597 1852 1419 1885">Harapannya kedepan hal-hal terkait pengelolaan perikanan yang</p>

		lebih strategis dapat terus diperkuat. Ucapan selamat juga untuk AP2HI dan pemprov. NTB atas diperolehnya sertifikasi MSC produk perikanan madidihang untuk perikanan pancing ulur dan Huhate yang beroperasi di WPP 713 (7 kapal). Semoga kedepan bisa terus ditingkatkan
	Hikmah Aslina Sari Plt. Kepala Bidang Perikanan Tangkap Pembukaan	Ucapan terima kasih disampaikan kepada MDPI dan seluruh stakeholder atas dukungannya terhadap pengelolaan perikanan tuna di Provinsi NTB. Harapannya MDPI dan anggota KPBP lainnya dapat terus berkontribusi demi keberlanjutan sumberdaya kelautan dan perikanan di NTB untuk kesejahteraan masyarakat pesisir.
	Panel Diskusi dan Penyampaian capaian Rencana Aksi	Substansi
	Sekretaris KPBP Tuna Provinsi NTB	<ul style="list-style-type: none"> - Menyampaikan kilas balik capaian-capaian dari KPBP Tuna Provinsi NTB sejak tahun 2022, hingga saat ini - Cukup banyak bentuk kontribusi dari KPBP untuk provinsi NTB dalam mendukung pengelolaan perikanan tuna di NTB, antara lain dengan melakukan pengumpulan data perikanan, fasilitasi pendaftaran kapal perikanan, proses perizinan rumpon, peningkatan kapasitas nelayan melalui KUB dan Koperasi, memfasilitasi keterampilan nelayan dalam melaut melalui SKN, penyadartahuan nelayan terhadap hewan-hewan ETP, penerbitan karya ilmiah sebagai referensi akademis dan kebijakan, dan masih banyak hal-hal lainnya - Harapannya semua ini dapat terus berlanjut dan dapat melakukan hal yang lebih strategis kedepannya
	Laurentius, PT. Sahabat Laut Lestari (SLL)	<ul style="list-style-type: none"> - SLL merupakan sosial enterprise yang dibentuk oleh MDPI pada tahun 2020 - Saat ini produk unggulan yang ditawarkan adalah teknologi traceability, yaitu TraceTales. Saat ini ada 12 perusahaan yang menggunakan TraceTales di Indonesia - Rencana tahun ini, SLL akan membuat sistem traceability dari tingkat nelayan, hingga konsumen. Dimana saat ini baru masih dimulai pada tingkat UPI/Processing - Kedepan, SLL akan melebarkan sayapnya dengan menjual produknya ke Malaysia
	Harry Chrystijanto Dit PSDI-KKP	<ul style="list-style-type: none"> - Keanggotaan Indonesia di RFMO, yaitu di WCPFC, IOTC dan CCSBT - Hasil pertemuan 21st WCPFC bahwa stok tuna tidak mengalami overfishing - Terdapat CMM 2024-04 terkait CLS (Crew Labour Standards) ini berlaku untuk kapal yang berlayar di laut lepas dan ZEEI, WCPFC - Marine polution (dilarang membuang alat tangkap, minyak, di laut)

<p>Muslim ST.,M.Si Kepala DKP Provinsi NTB</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rekomendasi clear terhadap daerah diperlukan untuk Dinas, untuk dikirimkan ke Gubernur. - Program kemitraan akan disinergikan untuk saling mengisi kekurangan - Pembinaan infrastruktur pelabuhan diperlukan agar terjangkau oleh pelaku usaha. Saat ini harga BBM terlampaui mahal. - Saat ini terlalu banyak regulasi yang sulit diimplementasikan - Saat ini kadis sedang menyusun data by sistem terkait kondisi eksisting nelayan di tiap kabupaten, termasuk kapalnya (by name by address) - Penangkapan, pengolahan, by data by sistem 																										
<p>Akbar Fitrianto S.Pi.,M.Si. PP Untia/Koordinator LPPWPP NRI 713</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Secara umum, LPP WPP belum memiliki kegiatan khusus terkait programnya. saat ini masih berfokus pada kegiatan dibawah SDI dan kepelabuhanan karena keterbatasan anggaran - Mengidentifikasi su perngelolaan perikanan di LPP WPP 713 sebagai berikut; <p style="text-align: center;">ISU TERKAIT PENGELOLAAN PERIKANAN DI WPPNRI 713 berdasarkan Hasil Review RPP (RPP) WPPNRI Tahun 2022</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #0070C0; color: white;"> <th style="width: 5%;">A</th> <th style="width: 95%;">SUMBER DAYA IKAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Degradasi stok ikan (Kakap, Kerapu, Cumi-cumi, Kuwe, Kembung, Layang, dsb, dilihat dari penurunan CPUE)</td> </tr> <tr style="background-color: #0070C0; color: white;"> <th style="width: 5%;">B</th> <th style="width: 95%;">LINGKUNGAN SUMBER DAYA IKAN</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Degradasi habitat penting dari sumber daya ikan (mangrove, lamun (dampak penambangan batu bara), terumbu karang dan lingkungan perairan)</td> </tr> <tr style="background-color: #0070C0; color: white;"> <th style="width: 5%;">C</th> <th style="width: 95%;">SOSIAL EKONOMI PERIKANAN</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Rendahnya kesejahteraan nelayan (terutama ABK)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Konflik antara nelayan atas sumber daya ikan (andon dengan nelayan tujuan andon, konflik pemasangan rumpon)</td> </tr> <tr style="background-color: #0070C0; color: white;"> <th style="width: 5%;">D</th> <th style="width: 95%;">TATA KELOLA PERIKANAN</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>LPP WPP 713 belum beroperasi optimal</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Masih maraknya praktik penangkapan ikan ilegal (bom) dan unreported (kapal tidak berizin) (umumnya IUU Fishing) dan rumpon</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Belum efektifnya implementasi alokasi pemanfaatan sumber daya ikan</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Belum efektifnya implementasi PKS andon belum sepenuhnya diterapkan di beberapa provinsi (kuota dengan realisasi)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td>Adanya Perusahaan yang menggunakan <i>teknologi traceability</i>, dilakukannya pemetaan potensi, pelatihan diversifikasi dan peningkatan nilai produk usaha bagi Masyarakat pesisir, penyadartahuan terkait <i>Harvest Strategy</i> tuna kepada stakeholder</td> </tr> </tbody> </table>	A	SUMBER DAYA IKAN	1	Degradasi stok ikan (Kakap, Kerapu, Cumi-cumi, Kuwe, Kembung, Layang, dsb, dilihat dari penurunan CPUE)	B	LINGKUNGAN SUMBER DAYA IKAN	1	Degradasi habitat penting dari sumber daya ikan (mangrove, lamun (dampak penambangan batu bara), terumbu karang dan lingkungan perairan)	C	SOSIAL EKONOMI PERIKANAN	1	Rendahnya kesejahteraan nelayan (terutama ABK)	2	Konflik antara nelayan atas sumber daya ikan (andon dengan nelayan tujuan andon, konflik pemasangan rumpon)	D	TATA KELOLA PERIKANAN	1	LPP WPP 713 belum beroperasi optimal	2	Masih maraknya praktik penangkapan ikan ilegal (bom) dan unreported (kapal tidak berizin) (umumnya IUU Fishing) dan rumpon	3	Belum efektifnya implementasi alokasi pemanfaatan sumber daya ikan	4	Belum efektifnya implementasi PKS andon belum sepenuhnya diterapkan di beberapa provinsi (kuota dengan realisasi)	5	Adanya Perusahaan yang menggunakan <i>teknologi traceability</i> , dilakukannya pemetaan potensi, pelatihan diversifikasi dan peningkatan nilai produk usaha bagi Masyarakat pesisir, penyadartahuan terkait <i>Harvest Strategy</i> tuna kepada stakeholder
A	SUMBER DAYA IKAN																										
1	Degradasi stok ikan (Kakap, Kerapu, Cumi-cumi, Kuwe, Kembung, Layang, dsb, dilihat dari penurunan CPUE)																										
B	LINGKUNGAN SUMBER DAYA IKAN																										
1	Degradasi habitat penting dari sumber daya ikan (mangrove, lamun (dampak penambangan batu bara), terumbu karang dan lingkungan perairan)																										
C	SOSIAL EKONOMI PERIKANAN																										
1	Rendahnya kesejahteraan nelayan (terutama ABK)																										
2	Konflik antara nelayan atas sumber daya ikan (andon dengan nelayan tujuan andon, konflik pemasangan rumpon)																										
D	TATA KELOLA PERIKANAN																										
1	LPP WPP 713 belum beroperasi optimal																										
2	Masih maraknya praktik penangkapan ikan ilegal (bom) dan unreported (kapal tidak berizin) (umumnya IUU Fishing) dan rumpon																										
3	Belum efektifnya implementasi alokasi pemanfaatan sumber daya ikan																										
4	Belum efektifnya implementasi PKS andon belum sepenuhnya diterapkan di beberapa provinsi (kuota dengan realisasi)																										
5	Adanya Perusahaan yang menggunakan <i>teknologi traceability</i> , dilakukannya pemetaan potensi, pelatihan diversifikasi dan peningkatan nilai produk usaha bagi Masyarakat pesisir, penyadartahuan terkait <i>Harvest Strategy</i> tuna kepada stakeholder																										
<p>Beberapa poin Diskusi;</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kebutuhan nelayan yaitu perizinan, SPB, SKKP, BBM, SAMSAT Perizinan Kapal Perikanan. SAMSAT masih belum memuaskan pelayanan. Usul, bisakah ada Satgas operasional dan konflik nelayan. Seperti Satgas <i>Destructive Fishing</i> misalnya - Buat paket peningkatan kapasitas nelayan tuna (CPIB, SKN, dll). - Informasi update perlu dilakukan, baik tentang harga ikan, BBM di tiap daerah, maupun hal lainnya - Apresiasi kepada pemprov terhadap respon cepat dalam mendukung industri perikanan di NTB - Kadis rencana mengundang pelaku usaha perikanan untuk bertemu gubernur untuk menyampaikan aspirasi. Membuat pemetaan tantangan untuk mempercepat potensi solusi 																										

Rencana Kerja KPBP Tuna Provinsi NTB 2024-2026

No	Kategori	Isu	Rencana Kerja	Target	Pelaksana	Tahun	Keterangan
1.	Penguatan Pengumpulan Data Perikanan	1. Kualitas Data Perikanan tangkap belum optimal dan perlu ditingkatkan	<ul style="list-style-type: none"> a. Perlu dilakukan verifikasi dan validasi data statistik ditingkat daerah b. Peningkatan SDM Validator data statistik perikanan tangkap terus dilakukan c. Pengumpulan data primer (sampling) perlu terus dilakukan d. Masih minimnya data ETP e. Peningkatan data e-Logbook/logbook yang disederhanakan pada nelayan skala kecil f. Perluasan wilayah cakupan pengumpulan data primer 	<ul style="list-style-type: none"> a. Validasi data statistik dilakukan 2 kali dalam 1 tahun (2 semester) b. Peningkatan keterampilan petugas data melalui training, quiz, dsb. (4 kali dalam 1 tahun) c. Dilakukan secara Periodik di supplier anggota (Lombok Timur, Kab. Bima, dan KLU) d. Adanya data terkait ETP pada pengumpulan data e. Ada 3 nelayan yang mengisi eLogbook/logbook yang disederhanakan f. Melakukan pengumpulan data perikanan tuna (primer) di KLU 	Akademisi, Dislutkan Prov. NTB. Diskan Kab/Kota, MDPI, Supplier, Nelayan, BPSPL Denpasar, Penyuluh Perikanan.	2024-2026	
		2. Belum adanya jumlah dan sebaran rumpon ditiap kab./kota di NTB	<ul style="list-style-type: none"> a. Perlu dilakukannya inventarisasi jumlah dan sebaran rumpon ditiap kab./kota di NTB b. Perlu dilakukan kajian alokasi rumpon sampai dengan 12 mil 	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya data jumlah dan sebaran rumpon yang dimiliki nelayan/pelaku usaha di 3 kabupaten (percobaan), yaitu KLU, Kab. Bima dan Lombok Timur b. Adanya hasil kajian alokasi rumpon sampai dengan 12 mil kewenangan Provinsi NTB 	Dislutkan Provinsi NTB, Diskan Kab. Bima, Lotim, KLU, Nelayan/Pelaku Usaha, LSM, Peneliti/akademisi	Tahun 2024-2026	
		3. Masih minimnya data bycatch	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengumpulan data bycatch (biota 	<ul style="list-style-type: none"> a. Dilakukannya pengumpulan data ETP pada setiap data 	BPSPL Denpasar Wilker NTB,	2024-2026	

		(Biota dilindungi) dan kesadaran nelayan terkait peran dari hewan ETP (<i>Endangered, Threatned and Protected</i>)	dilindungi) perlu ditingkatkan b. Diseminasi pentingnya peran hewan ETP bagi ekosistem dan dasar-dasar mitigasinya	primer b. Dilakukannya diseminasi peran hewan ETP bagi nelayan di 5 lokasi (Lombok Timur, Mataram, KLU, KSB dan Bima)	Dislutkan Provinsi NTB, DKP Kab/Kota, LSM, Nelayan		
2.	Peningkatan Legalitas Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> Masih banyak rumpon yang belum memiliki izin Melanjutkan upaya peningkatan legalitas kapal perikanan (Pas Kecil, eBKP) Belum adanya upaya penelusuran produk perikanan Belum ada peraturan daerah terkait Pengelolaan SDKP Terbatasnya wilayah tangkap nelayan NTB karena WPP 573 dan 713 merupakan zona yang berbeda yang juga berakibat pada lokasi pendaratan 	<ol style="list-style-type: none"> Dilakukannya pendaftaran/perizinan rumpon Dilakukannya pendaftaran kapal untuk memperoleh pas kecil dan/eBKP Adanya Perusahaan yang menggunakan teknologi <i>traceability</i>? Melanjutkan pembahasan draft Perda pengelolaan SDKP Perlu diupayakan permakluman ditingkat pembuat kebijakan terkait lokasi penangkapan yang dilakukan 2 WPP sejak puluhan tahun 	<ol style="list-style-type: none"> Ada 2 rumpon yang masing-masing memiliki KKPRL dan SIPR dan Tutorial tata cara pendafataran rumpon (KKPRL dan SIPR) Dilakukannya pendaftaran kapal perikanan (Pas Kecil/eBKP) dengan target 200 dokumen 1 perusahaan menggunakan teknologi <i>traceability</i>. <i>Hipoint fisheries</i>? Adanya draft lanjutan Perda Pengelolaan SDKP Dilakukan FGD kecil bersama stakeholder, dan rumusannya dikirimkan ke pusat sebagai salah satu pertimbangan kebijakan 	Dislutkan NTB, Pelaku Usaha/nelayan, DKP Kabupaten, KUPP/KSOP, LSM, BPSPL Denpasar, Wilker Mataram, akademisi, Biro hukum	2024-2026	<ol style="list-style-type: none"> NTB berada di 2 WPP (573 dan 713) sejak turun temurun memancing di 2 WPP tersebut tergantung musim. Sedangkan kedua WPP tersebut merupakan zona yang berbeda

3.	Peningkatan Kapasitas Anggota KPBP Tuna	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya pendapatan nelayan saat musim paceklik 2. Masih banyak nelayan yang belum memiliki sertifikasi Kecakapan (SKN) 3. Masih banyak nelayan yang belum memahami keberlanjutan sumberdaya Perikanan 4. Masih banyak nelayan yang belum begitu focus terhadap penjagaan kualitas ikan 5. Belum optimalnya pemahaman stakeholder terkait <i>Harvest Strategy</i> Tuna 6. Masih banyak nelayan yang belum memiliki kemampuan yang baik dalam pengelolaan keuangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlunya Upaya alternatif mata pencaharian untuk Masyarakat pesisir saat musim paceklik 2. Perlu dilakukannya bimtek SKN untuk nelayan 3. Perlunya sosialisasi/pendampingan terkait peningkatan pemahaman perikanan berkelanjutan 4. Dilakukannya bimtek CPIB untuk nelayan dan supplier 5. Penyadartahuan terkait <i>Harvest Strategy</i> tuna kepada stakeholder 6. Dilakukannya literasi keuangan pada Masyarakat pesisir 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukannya pemetaan potensi dan pelatihan diversifikasi usaha bagi Masyarakat pesisir 2. Dilakukannya Bimtek SKN untuk 200 nelayan 3. Dilakukannya sosialisasi terkait perikanan berkelanjutan kepada 90 nelayan 4. Dilakukannya Bimtek CPIB untuk 100 nelayan 5. Dilakukannya sosialisasi/diseminasi terkait <i>harvest strategy</i> tuna di 3 lokasi (KLU, Lombok Timur, dan Kab. Bima) 6. Dilakukannya pelatihan literasi keuangan untuk 100 masyarakat pesisir 	Dislutkan NTB, DKP Kab/Kota, PP Teluk Awang, PP Labuhan Lombok, PPN Pengembangan, Pelaku usaha/nelayan, Pemerintah Desa, LSM	2024-2026	
4	Penguatan Kelembagaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlunya nelayan memiliki KUB/ Koperasi yang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Koperasi yang re-Aktif atau koperasi baru 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaktifan 1 Koperasi nelayan di Kore 2. Mengundang/melibatkan 	Dislutkan Prov. NTB, DKP Kab/Kota, Dinas	2024-2026	

		<ul style="list-style-type: none"> aktif 2. Masih ada lembaga yang perlu dilibatkan dalam KPBP 	<ul style="list-style-type: none"> yang aktif 2. Identifikasi K/L yang perlu dilibatkan dalam cakupan kegiatan KPBP 	K/L pada kegiatan KPBP	Koperasi, Pemerintah Desa, Pelaku Usaha/Nelayan, Penyuluh Perikanan, Penyuluh Koperasi, LSM		
5.	Publikasi Ilmiah dan Pelibatan akademisi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Masih sedikitnya literasi yang berkaitan dengan perikanan tuna di NTB 2. Masih minimnya keterlibatan mahasiswa/fresh graduate dalam pengelolaan perikan 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Perlu peningkatan literasi ilmiah 2. Adanya mahasiswa magang/PKL di KPBP 		Dislutkan NTB, Akademisi, LSM, Pelaku usaha/Industri	2024-2026	Fokus pada wilayah tangkap di NTB
6.	Penanganan Sampah Laut	<ul style="list-style-type: none"> 1. Masih banyak masyarakat pesisir yang memiliki Tingkat kedasaran yang rendah terkait pengelolaan sampah 2. Masih banyak masyarakat pesisir yang membuang sampah tidak pada tempatnya (Laut) 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendampingan terkait tata cara pengelolaan sampah yang baik, baik sampah organik maupun anorganik 2. <i>Awareness Raising</i> untuk masyarakat pesisir dan bersih Pantai secara Bersama pada waktu tertentu 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya pendampingan tata cara pengelolaan sampah yang baik, baik sampah organik maupun anorganik 1 kali di Lombok Timur, Bima, KLU dan KSB 2. Dilakukannya peningkatan kedasaran dengan sosialisasi dan bersih pantai bersama kepada Masyarakat pesisir 1 kali di Lombok Timur, Bima, KLU dan KSB 	BPSPL Denpasar, Dislutkan Prov. NTB, DKP Kab/Kota, Dinas Koperasi, Pemerintah Desa, Pelaku Usaha/Nelayan, Penyuluh Perikanan, Akademisi, LSM	2024-2026	

Lampiran

CAPAIAN RENCANA AKSI SAMPAI JANUARI 2025

No.	Nama Proyek/Kegiatan	Output	volume	satuan	lokasi	Sasaran/Objek yang diintervensi
1	Pengumpulan data primer hasil tangkapan tuna pancing ulur dalam mendukung implementasi HS Tuna	20% data sampling dari mitra industri/supplier			Bima dan Labuhan Lombok	Nelayan
2	Pemasangan tracking system diatas kapal	Terpasangnya tracking sistem diatas kapal	4	trip	Bima dan Labuhan Lombok	Nelayan
3	Pendampingan Pengisian Logbook	data logbook	15	Data	Bima	Nelayan
4	Fasilitasi validasi data statistik perikanan tangkap	Data Statistik perikanan Tangkap semester I tervalidasi			Mataram	Pemerintah
5	Peningkatan Kapasitas petugas data terkait teknik identifikasi ikan	Petugas data dari 10 kab/kota di NTB mengikuti kegiatan	20	orang	Mataram	Pemerintah
6	Pendaftaran kapal perikanan (Pas Kecil)	Dokumen Pas Kecil terbit	30	Dokumen	KSB dan Dompu	Nelayan
7	Pendaftaran kapal perikanan (eBKP)	Dokumen eBKP terbit	52	Dokumen	KSB, KLU, dan Dompu	Nelayan
8	Fasilitasi Pendaftaran PKKPRIL Rumpon	Dokumen PKKPRIL terbit	1	Dokumen	KSB	Nelayan/Koperasi
9	Fasilitasi Pendaftaran KKPRL Rumpon	Dokumen KKPRL on Progress	1	Dokumen	KLU	Nelayan
10	Fasilitasi Pendampingan pendaftaran SIPR	Dokumen SIPR terbit	1	Dokumen	KSB	Nelayan
11	Pendampingan dan Peningkatan kapasitas literasi keuangan masyarakat pesisir	Peningkatan Kapasitas	23	Orang	Bima	Masyarakat Pesisir
12	Fasilitasi pelatihan SKN	Peningkatan Kapasitas	47	Orang	KLU	Nelayan
13	Sosialisasi penanganan Sampah laut	Peningkatan Penysadartahuan	48	orang	Lombok Timur	Masyarakat Pesisir
14	Penanaman bibit Mangrove	Tertanamnya bibit mangrove di desa Seruni Mumbul	150	bibit	Lombok Timur	Masyarakat Pesisir
15	Pendampingan untuk mendapatkan dukungan komposter bag	Koperasi nelayan dampingan mendapatkan bantuan komposter bag dari DLH Lotim untuk mengelola sampah rumah tangga	5	Kantong	Lombok Timur	Masyarakat Pesisir
16	Pendampingan Pengelolaan Sampah rumah tangga menjadi pupuk organik	Pupuk organik dari sampah rumah tangga	5	Rumah Tangga	Lombok Timur	Masyarakat Pesisir
17	Diseminasi perikanan berkelanjutan (WFD/HARKANAS)	Masyarakat pesisir desa Kore Bima, mendapatkan gambaran umum pentingnya menjaga keberlanjutan SDI	50	orang	Bima	Masyarakat Pesisir
18	Publikasi Buku Profil Perikanan Tuna Provinsi NTB	Buku	1	Buku	Mataram	Potensi Perikanan Tuna NTB
19	Penyediaan ruang MBKM Mahasiswa	Mahasiswa melakukan MBKM	2	orang	Lombok Timur dan Bima	Mahasiswa
20	Fasilitasi Pertemuan KPBP Tuna Prov. NTB	Sosialisasi dan Rencana Aksi			Mataram	Stakeholder Perikanan Tuna

DOKUMENTASI





Foto bersama dan proses diskusi kelompok pada saat kegiatan

Berita Acara dan Rangkuman FGD pada pertemuan Reguler KPBP Tuna Provinsi NTB ke-5 Kamis, 23 Januari 2025

Komitmen Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka mewujudkan pembangunan perikanan yang berkelanjutan khususnya perikanan tuna, agar mencapai manfaat yang optimal serta terjaga kelestariannya sumber dayanya dengan memperhatikan aspek ekonomi, ekologi dan sosial-budaya diwujudkan melalui pembentukan Komite Pengelola Bersama Perikanan (KPBP) Tuna Provinsi NTB dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: 523-637 Tahun 2020. KPBP Tuna Provinsi NTB merupakan Komite yang digagas oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB dan Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI) dengan melibatkan seluruh *stakeholder* yang terdiri dari unsur-unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kelompok Nelayan/Koperasi, Pengusaha Perikanan, Akademisi, Asosiasi Industri dan Lembaga Swadaya. Pada hari ini, Kamis 23 Januari 2025 telah melakukan pertemuan Reguler Komite Pengelola Bersama Perikanan Tuna Provinsi NTB ke- 5;

A. Dengan memperhatikan:

1. Pemaparan para narasumber dengan tema:
 - 1) Arah Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan Prov NTB
 - 2) Rencana kerja dan upaya integrasi LPPWPP 713 dengan KPBP Tuna di Provinsi
 - 3) Traceability system untuk kebutuhan pasar ekspor
 - 4) Sosialisasi terkait hasil pertemuan RFMO baik di WCPFC dan peningkatan status stok Madidihang di IOTC
2. Diskusi dan sesi berbagi dari unsur-unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kelompok Nelayan/Koperasi, Pengusaha Perikanan, Akademisi, Asosiasi Industri dan organisasi non profit yang menjabarkan kondisi, tantangan, yang dihadapi dan harapan tindak lanjut yang dibutuhkan terkait pengelolaan perikanan tuna berkelanjutan di Provinsi NTB.

1. Regulasi dan Kepatuhan

- **Permasalahan:**
 - Biaya pemasangan dan pemeliharaan VMS yang mahal dan kurangnya pemahaman manfaat VMS tersebut bagi nelayan. Biaya alat dan pemasangan 10-15 juta dan 5-6,5 juta airtime/tahun. Jika tidak ada VMS, tidak diberikan SLO
 - Sosialisasi regulasi dan sertifikasi masih membingungkan. Masih ada kapal izin daerah namun memancing diatas 12 mil, menandakan pengawasan yang rendah menyebabkan ketidakadilan. Begitu juga sertifikasi CPIB sulit diterbitkan karena harus dilakukan saat bongkar muat dan nelayan harus memiliki SKPI. Hal ini mempengaruhi grade perusahaan
 - Proses migrasi izin kapal yang lama dan kompleks.

- Nelayan dengan Kapal <5 GT masih belum paham mengenai Alur dan Persyaratan untuk mendapatkan E-Pas Kecil dan E-BKP.
- Pengurusan dokumen kapal yang panjang dan harus melalui agen. Banyak agen kapal yang mematok harga tinggi dan bahkan beberapa dokumen yang seharusnya tidak berbiaya dikenakan tarif oleh agen. Pelaku usaha kebingungan dengan jenis dokumen kapal mana yang seharusnya berbayar dan mana yang seharusnya tidak berbayar.
- Proses perizinan rumpon yang panjang, terutama proses PKKPRRL rumpon yang harus melalui penilaian teknis oleh DJPRL - KKP. Proses yang panjang bisa sampai 1 tahun lebih ini membuat nelayan mulai enggan dan pesimis untuk mendaftarkannya. Selain itu persyaratan yang diminta cukup kompleks dan cukup sulit untuk dipenuhi terutama oleh nelayan skala kecil. Padahal di satu sisi rumpon merupakan salah satu kunci dalam keberhasilan penangkapan ikan yang membuat banyak nelayan bergantung kepada rumpon. Karena proses yang panjang dan kompleks ini pelaku usaha cenderung memasang rumpon tanpa dikantongi oleh izin.
- PNBP memberatkan dengan jumlah yang ditentukan saat ini. Misalkan dapat hanya 500kg, itu belum kembali modal, namun masih harus bayar PNBP. Perlu evaluasi cara pembayaran. Ini dirasa memberatkan karena tidak memperhitungkan biaya operasional melaut yang dikeluarkan sangat besar.
- **Rekomendasi Solusi:**
 - Subsidi biaya VMS atau skema pembayaran bertahap, terjangkau, dan teknisi VMS tersedia di daerah untuk membantu perbaikan jika terjadi masalah pada alat.
 - Sosialisasi regulasi dengan pendekatan yang lebih sederhana dan berbasis kebutuhan nelayan, dengan menyediakan infografis yang disebar di sentra nelayan/pelabuhan.
 - Penempatan perwakilan layanan perizinan pusat di daerah untuk mempermudah transisi perizinan.
 - Pengawasan ketat terhadap agen perizinan untuk meningkatkan kredibilitas.
 - Penyederhanaan proses perizinan rumpon dengan tetap mempertahankan aspek substansi, terutama untuk nelayan kecil (sampai dengan 5 GT).
 - Pendampingan dan Edukasi Nelayan/KUB/Koperasi untuk mencoba dan belajar mengurus Dokument E-Pas Kecil dan E-BKP.
 - Perlu evaluasi perhitungan pembayaran PNBP termasuk dengan mempertimbangkan pengurangan biaya operasional

2. Kesejahteraan dan Sumber Daya Manusia (SDM)

- **Permasalahan:**
 - Kesulitan mencari ABK karena profesi nelayan dianggap kurang bergengsi.
 - Kurangnya pengelolaan keuangan oleh nelayan, terutama saat musim paceklik.
 - Kurangnya peningkatan kapasitas nelayan secara merata.

- Masih banyak nelayan yang belum memiliki asuransi.
- Masih banyaknya nelayan yang sangat bergantung kepada supplier atau pengepul, sehingga nelayan berhutang kepada supplier. Ada keinginan nelayan melalui kelompok nelayan untuk menjalankan usaha jual beli ikan, namun mereka terjerat hutang kepada supplier dan terkendala Modal Usaha. Dalam hal ini buyer sangat berhati-hati untuk langsung memotong rantai yang panjang ini, apalagi jika peran supplier sangat dominan.
- Harga ikan yang turun sangat drastis seperti di Kore-Kabupaten Bima saat ini menjadi sangat riskan bagi nelayan. Akibatnya nelayan mengalihkan target tangkapan ke kakap-kerapu dan spesies lainnya yang memiliki harga lebih murah. Bahkan banyak nelayan yang tidak bisa pergi melaut.
- **Rekomendasi Solusi:**
 - Branding profesi nelayan melalui kampanye nasional dan membuat Perjanjian Kerja Laut (PKL) antara nelayan dan perusahaan.
 - Edukasi dan pendampingan terkait manajemen keuangan nelayan.
 - Program pelatihan berkelanjutan untuk peningkatan kapasitas nelayan.
 - Mendorong kepesertaan nelayan dalam program asuransi melalui insentif.
 - Penguatan koperasi atau kelompok nelayan untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan guna meningkatkan taraf hidup anggota kelompok dan memotong rantai supplier yang terlalu panjang.

3. Infrastruktur dan Fasilitas Pelabuhan

- **Permasalahan:**
 - Keterbatasan sarana dan prasarana di pelabuhan, baik space, pelabuhan kurang besar, pedagang lokal tidak tertib dan masih banyak orang yang tidak berkepentingan keluar masuk yang dapat merugikan nelayan
 - Fasilitas umum di lingkungan pelabuhan kurang memadai.
 - Keterbatasan air bersih di PP Teluk Awang, sulit untuk mengakses es dan BBM di sentra nelayan, salah satu contoh di desa Kore kabupaten Bima.
 - Pengelolaan tempat pemasaran ikan yang belum optimal, serta perluasan akses pasar untuk hasil pengolahan produk perikanan.
- **Rekomendasi Solusi:**
 - Peningkatan infrastruktur pelabuhan sesuai kebutuhan nelayan seperti ketersediaan dan mudah untuk mengakses es, BBM (subsidi/non Subsidi) dengan harga yang sama/terjangkau.
 - Penyediaan fasilitas dasar di sentra nelayan.
 - Pengadaan SPDN tambahan di lokasi strategis.
 - Revitalisasi pasar ikan dan mendampingi dan memfasilitasi sertifikasi produk (halal, pirt, BPOM).

4. Ekonomi dan Akses Permodalan

- **Permasalahan:**
 - Harga ikan yang tidak stabil dan kurangnya persaingan sehat.
 - Biaya operasional melaut yang cukup besar terutama BBM. Contoh kasus nelayan di Kore - Bima sulit mengakses kuota BBM dari SPBU. Lokasi SPBU yang menyalurkan BBM bersubsidi hanya ada di kota Bima dan lokasi ini sangat jauh. Sementara untuk dapat mengakses BBM ke Dompu (yang lokasinya lebih dekat) terkendala secara administrative). Di satu sisi kuota BBM untuk nelayan yang ditiptikan di SPBU banyak tidak termanfaatkan.
 - Sulitnya akses es untuk mempertahankan rantai dingin bagi nelayan kecil di sentral perikanan seperti di Kore. Es disediakan melalui produk rumahan yang sangat terbatas. Bahkan supplier mendatangkan es dari luar wilayah seperti Sape dan Pelampang. Hal ini juga menjadi salah satu penyebab turunnya harga ikan
 - Akses permodalan koperasi yang terbatas.
 - Pemanfaatan koperasi yang belum optimal.
 - Minimnya diversifikasi usaha nelayan.
- **Rekomendasi Solusi:**
 - Adanya kerjasama antar pemerintah Dompu dan Bima agar nelayan yang berada di daerah perbatasan dapat mengakses kuota BBM ke SPBU terdekat.
 - Standarisasi harga ikan melalui mekanisme pasar yang transparan dari tingkat nelayan hingga Industri.
 - Penyediaan akses permodalan tanpa/ bunga rendah bagi koperasi nelayan.
 - Pendampingan koperasi untuk optimalisasi fungsi dan peran.
 - Pengembangan usaha berbasis komunitas nelayan seperti KUB dan Koperasi perlu lebih diperkuat.
 - Perlunya mengaktifkan kembali pabrik es seperti di Desa Sandue Kec. Sanggar.

5. Lingkungan dan Keberlanjutan

- **Permasalahan:**
 - Pencemaran lingkungan dari pertanian jagung, tambak udang dan tambang emas ilegal seperti yang terjadi di Pulau Sumbawa dan Lombok Utara.
 - Masih maraknya destructive fishing di Kabupaten Sumbawa Barat dan Lombok Timur.
 - Ukuran ikan yang makin kecil dan lokasi tangkapan yang semakin jauh.
 - Kualitas data perikanan yang rendah.
- **Rekomendasi Solusi:**
 - Program reboisasi dan pengelolaan limbah yang ketat, baik dari tingkat rumah tangga maupun skala industri (budidaya udang di NTB misalnya).
 - Penguatan pengawasan oleh PSDKP terhadap destructive fishing.

- Peningkatan kualitas dan penguatan data melalui Komunitas Nelayan, penentuan ukuran ikan yang boleh ditangkap, dan perbaikan lingkungan seperti terumbu karang, penanganan sampah rumah tangga, penanaman mangrove di lokasi yang membutuhkan.
- Implementasi logbook yang disederhanakan di tingkat komunitas nelayan untuk data yang lebih akurat.

Lampiran hasil diskusi Kelompok

B. Isu dan permasalahan yang teridentifikasi:

Kelompok Askar

- 1) Kewajiban penggunaan VMS yang biayanya mahal dan tidak terjangkau untuk kapal yang beroperasi diatas 12 mil. Biaya pemasangan VMS 10-15 juta, dan 5-6,5 juta/tahun. Nelayan tidak tau manfaat atau kegunaannya. No VMS, no SLO. Sehingga nelayan tidak bisa melaut
- 2) Nahkoda kesulitan mencari ABK. Profesi nelayan menjadi profesi terbelakang, perlu branding nelayan menjadi profesi yang bergengsi
- 3) Masih ada kapal yang izin daerah tapi memancing diatas 12 mil. Pengawasan masih rendah. Ada terlihat ketidakadilan
- 4) PNBP memberatkan dengan jumlah yang ditentukan saat ini. Misalkan dapat hanya 500kg, itu belum kembali modal, namun masih harus bayar PNBP. Perlu evaluasi cara pembayaran
- 5) Belum terakomodir secara menyeluruh terkait tata cara penanganan ikan yang baik untuk nelayan dan pengusaha
- 6) Sarana dan Prasarana pelabuhan dan personil di pelabuhan terbatas, sehingga pelayanan tidak prima yang berdampak pada aktifitas nelayan terhambat. Selain itu perlu di sortir orang-orang yang berkepentingan saja yang boleh masuk wilayah pelabuhan, yang merugikan nelayan. Sehingga perlu SOP dan pengawasan yang lebih ketat
- 7) Sosialisasi terkait regulasi yang perlu dipenuhi pelaku usaha, serta sertifikasi yang diwajibkan perlu disosialisasikan dan disampaikan dengan jelas karena masih membingungkan terutama yang berbayar/tidak.
- 8) Anggota koperasi hanya semangat mendirikan, namun belum memanfaatkan dengan optimal

Kelompok Pak Mus

1. Harga Ikan tidak stabil, perlu ada standarisasi harga ikan. Disana hanya ada supplier lokal dan perlu ada persaingan sehat.
2. Kurangnya akses permodalan di koperasi. Perlu adanya akses permodalan tanpa bunga
3. Diversifikasi usaha dan peningkatan kapasitas anggota dalam membangun usaha kelompok
4. Pencemaran limbah tambang emas ilegal, dan banjir. Perlu reboisasi.
5. Masih adanya Destuctive Fishing di Kabupaten Sumbawa Barat, perlu penguatan pengawasan oleh PSDKP
6. Kurangnya kualitas data ditingkat nelayan kecil, perlu adanya logbook ditingkat komunitas
7. Pengurusan dokumen yang cukup panjang, perlu penguatan samsat kapal perikanan di pelabuhan (ada 2 instansi)
8. Kurangnya air bersih di teluk awang dan selisih harga BBM non subsidi yang cukup tinggi 5-7 ribu/liter

9. Belum meratanya peningkatan kapasitas nelayan

Kelompok Bu Yani

1. Dokumen kapal yang lama seperti STBLKK dan melalui agen. Perlu ada kontrol agen yang kredibel dan terpercaya.
2. migrasi izin kapal masih prosesnya panjang dan lama. Perlu ada perwakilan nelayan perizinan pusat ditempatkan di daerah. Jika bisa, izin dikembalikan ke daerah
3. Kesulitan dalam penerbitan CPIB karena inspeksi harus dilakukan saat bongkar muat dan nelayan harus punya SKPI. Saat ini perusahaan HPF grade A, namun jika di rantai pasok belum CPIB, berpengaruh kepada grade, yang berpengaruh juga terhadap akses pasar
4. Fasilitas pelabuhan belum mencukupi kebutuhan operasional nelayan, space pelabuhan kurang besar, belum tercukupinya es dan BBM, penjual lokal tidak tertib
5. Jalan dan fasilitas umum belum memadai di lingkungan pelabuhan dan non pelabuhan yang merupakan sentra nelayan seperti di Desa Kore, Kabupaten Bima

Kelompok Mba Dita

1. SDM dari hulu ke hilir masih sangat terbatas. Sosialisasi dan pendampingan perizinan, dan semua aspek. Peningkatan kesadaran masyarakat juga penting untuk memelihara property
2. Kurangnya pengelolaan keuangan nelayan, yang ketika musim paceklik nelayan tidak ada penghasilan dan banyak yang melakukan peminjaman
3. Perlunya penguatan kelembagaan nelayan dengan berkelompok untuk peningkatan SDM berkelanjutan
4. Tempat pemasaran ikan belum maksimal dan kesadaran masyarakat dalam memelihara properti
5. Akses BBM dan ketersediaan SPDN sangat terbatas di Pelabuhan atau dekat sentra nelayan
6. Akses pasar produk olahan perikanan masih rendah dan perlu dikuatkan/diperluas
7. Perlu adanya keikutsertaan Industri dalam sosialisasi mutu kepada nelayan
8. Masih banyak nelayan dan pegawai pabrik yang belum memiliki asuransi untuk keselamatan

Kelompok Rahmat

1. Ukuran ikan saat ini yang ditangkap lebih kecil, jaraknya semakin jauh, yang disebabkan kemungkinan karena pencemaran lingkungan dari pencemaran tambak udang
2. Proses perizinan rumpon yang panjang terutama PKKPR. Perlu penyederhanaan namun tidak mengurangi substansi, terutama untuk nelayan dengan kapal sampai dengan 5 GT